

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi, yaitu pada sistem ini mengutamakan supremasi hukum yang digunakan sebagai landasan kehidupan bernegara. Sehingga demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang ideal untuk Indonesia. Selain itu, adanya jaminan atas hak asasi manusia menjadi salah satu alasan yang menjadikan sistem demokrasi sebagai sistem politik yang baik. Mengutip pernyataan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*)¹, karena kekuasaan merupakan alat utama dalam proses politik dan sumber kekuasaan tersebut berasal dari rakyat. Maka dari itu rakyat yang mempunyai peranan penting untuk mewujudkan bentuk kehidupan yang demokratis.

Salah satu cara mewujudkan negara yang lebih demokratis tersebut adalah dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) secara langsung, dan dalam proses pelaksanaannya pemilu diikuti oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Hal tersebut sesuai dengan sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu² :

¹ Budiyanto. 2000. *Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, hlm. 39

² Dikutip dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum* Pasal 1 Ayat 27

Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Pemilu adalah proses politik demokratis yang berfungsi mewujudkan

kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. Pemilu pada sisi lain, merupakan mekanisme perebutan kekuasaan secara damai di antara kelompok masyarakat yang mempunyai perbedaan kepentingan beraneka ragam. Selain itu, pemilu juga merupakan adu kekuatan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan melalui dukungan masyarakat. Pemilu yang demokratis adalah pemilihan pemimpin politik melalui pemilu yang kompetitif³. Maka dari itu, formula demokratis mengisyaratkan dua hal penting, yaitu pemilu dan partai politik—demi menegaskan adanya aransemen institusional sebelum memasuki sistem demokratis yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.

Kaitan partai politik dan pemilu—dengan demokrasi dapat diidentifikasi, dilihat dari sejauh mana “pertarungan antar kelompok” terekspresikan sehingga menghasilkan perwakilan politik. Tingkat demokratis sebuah partai politik dan pemilu—terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah partai politik dalam setiap pemilu, semakin demokratis pula proses pemilihan tersebut⁴. Negara yang demokratis khususnya di Indonesia, pemilu sebagai cerminan suara rakyat menjadi penentu untuk keberlangsungan

³ Sri Yanuarti. 2009. *Golput dan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol. 6, No. 1, hlm. 22

⁴ Valina Singka Subekti. 2019. *Sistem Pemilu dan Penguatan Presidensialisme Pasca Pemilu Serentak 2019*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik. FISIP. Universitas Indonesia. Jakarta

sebuah negara agar menentukan nasib dan tujuan dari bangsa itu sendiri. Suara-suara tersebut yang akan diwadahi oleh partai politik menjadi wujud wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Implementasi pemilu di Indonesia terlaksana berdasarkan rakyat atau konstituen dapat memilih langsung para calon anggota legislatif yang didukungnya untuk memperoleh kursi di DPR, dan DPRD dengan cara mencoblos foto kandidat atau partai politik yang ada pada surat suara. Partai politik menurut Carl J. Friedrich didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi para pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan kepada anggota partai manfaat yang bersifat idiiil maupun materil⁵.

Partai politik setelah mendapatkan kekuasaan—akan melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui wakilnya di parlemen. Melalui partai politik, masyarakat diwadahi untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Semakin banyak suatu partai memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi politik, maka semakin besar pula partai tersebut mendapat dukungan dari masyarakat, dengan besarnya dukungan yang diperoleh maka partai tersebut dapat menjadi partai yang berkuasa. Setiap partai politik yang berada dalam suatu sistem politik memiliki peran yang dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang telah dijalankan oleh partai politik itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut yang menentukan identitas serta kredibilitas

⁵ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 161

sebagai salah satu kekuatan politik yang mencerminkan kekuatan rakyat, terutama di negara demokratis. Fungsi-fungsi partai politik tersebut secara umum adalah :

a. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses ketika individu atau kelompok memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok tersebut berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu negara, karena proses penyampaian dalam sosialisasi politik berupa norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

b. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal secara lokal maupun nasional, karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partai. Rekrutmen politik dapat menjamin keberlangsungan partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

c. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat di tengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang maupun kelompok tidak akan tersalurkan apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat atau aspirasi lain yang relevan, proses ini disebut sebagai *interest aggregation*. Setelah penggabungan

pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir (*interest articulation*). Apabila peran utama ini tidak dilaksanakan, akan terjadi isu yang saling berbenturan.

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Fungsi ini merupakan suatu proses di mana partai politik juga memiliki peranan dalam mengatasi perselisihan atau konflik. Untuk membantu mengatasi konflik di antara masyarakat atau dapat meminimalisir akibat negatif yang ditimbulkan oleh konflik⁶.

Banyaknya partai politik yang lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggambarkan kehidupan demokrasi di Indonesia semakin progresif. Pada Pemilu tahun 2019, jumlah partai politik yang mengikuti pemilu sebanyak 16 peserta partai politik. Beberapa di antaranya terdapat partai-partai baru yang dinyatakan lolos oleh KPU berdasarkan syarat-syarat keikutsertaan dalam pemilu, yaitu syarat administrasi dan verifikasi faktual yang lengkap secara nasional oleh KPU. Berikut nama-nama partai yang mengikuti pemilu legislatif 2019 :

⁶ *Ibid*, hlm. 163-164

Tabel 1.1 Daftar Partai yang Mengikuti Pemilu Tahun 2019

No	Nama Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Sumber : diolah dari data KPU

Dari keseluruhan 16 partai politik tersebut terdapat beberapa partai politik baru yaitu; Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)⁷.

Berdasarkan jumlah partai politik yang menjadi peserta pada Pemilu 2019, perhatian peneliti terpusat pada Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Beringin Karya, perihal sosialisasi politik yang dilakukan kedua partai baru ini pada masa Pemilu 2019. PSI dan Partai Berkarya merupakan dua dari empat partai politik baru yang ikut berkompetisi di arena perpolitikan 2019. Kedua partai tersebut dinyatakan resmi menjadi peserta pemilu tahun 2019 setelah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional oleh KPU⁸. PSI adalah partai politik baru di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 November 2014, dan dipimpin oleh Grace Natalie, yaitu seorang mantan pembawa acara dan berita.

Sosialisasi yang dilakukan oleh PSI sebagai partai baru dapat memenuhi jumlah keanggotaan partai sesuai dengan syarat verifikasi faktual berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Sosialisasi politik yang dilakukan PSI berbeda dari partai lain khususnya sosialisasi melalui media sosial, seperti menggunakan bahasa yang santai dan mudah diterima oleh kaum muda⁹. PSI menggunakan bahasa gaul yang sering digunakan oleh kaum

⁷ Pemilu Serentak 2019, diakses pada 12 September 2019, 22.06 WIB melalui www.liputan6.com

⁸ PSI Lolos Verifikasi Faktual, Tersulit dalam Sejarah Indonesia, diakses pada 14 September 2019, 02.34 WIB melalui <https://news.detik.com/berita/d-3849448/lolos-verifikasi-faktual-psi-tersulit-dalam-sejarah-indonesia>

⁹ Partai Solidaritas Indonesia, diakses pada 14 September 2019, 23.34 WIB melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Solidaritas_Indonesia

muda saat berinteraksi melalui media sosial. Hal ini merupakan sarana atau alat untuk menunjukkan eksistensi PSI kepada masyarakat khususnya kaum muda yang menjadi target dari sosialisasi politik PSI. Salah satu yang menjadi ciri khas PSI adalah, memakai panggilan sapaan *Bro* dan *Sis* ketika melakukan interaksi dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan egaliter merasakan kesetaraan.

PSI sebagai partai baru menyatakan bahwa kader-kader PSI adalah anak muda, dan tidak boleh adanya mantan politisi partai lain yang menjadi anggota PSI¹⁰. Hal ini menjadikan PSI sebagai partai yang tidak mencalonkan anggotanya yang berstatus mantan narapidana koruptor seperti partai lain pada umumnya. Salah satu partai politik yang beranggotakan mantan koruptor adalah Partai Berkarya, yaitu Partai Berkarya sendiri dipimpin oleh seorang mantan terdakwa kasus korupsi PT Goro Batara Sakti (GBS) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) pada tahun 1994. Sosok yang memimpin Partai Berkarya adalah Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto, putra bungsu dari mantan Presiden Soeharto ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya sejak 11 Maret 2018¹¹.

Partai Berkarya berpandangan bahwa masa kejayaan Indonesia terjadi pada masa Orde Baru, yaitu pada masa itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ketika partai lain mencoba menghindari dari sebutan partai Orde Baru, Partai Berkarya justru sengaja menggunakan sosok Soeharto dan Orde Baru sebagai bagian yang signifikan dari Partai Berkarya. Hal ini dilakukan Partai Berkarya untuk masyarakat

¹⁰ Profil Partai Solidaritas Indonesia, diakses pada 14 September 2019, 00.08 WIB melalui <https://psi.id/>

¹¹ Rentetan Kasus Tommy Soeharto, diakses pada 17 September 2019 melalui <https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-kasus-hukum-tommy-soeharto>

yang rindu masa kejayaan Orde Baru¹². Sosialisasi yang dilakukan Partai Berkarya dapat dikatakan nyaris sama dengan partai lain pada umumnya, yaitu cenderung kepada kaum petani, nelayan, hingga usaha kecil dan menengah, seperti yang dilakukan Tommy Soeharto dan kader Partai Berkarya dalam mengikuti kegiatan panen raya di Kabupaten Cianjur dan Purbalingga pada waktu yang berdekatan di bulan Maret tahun 2019¹³.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa, Partai Berkarya dan PSI memiliki cara bersosialisasi yang berbeda. Partai Berkarya mendeklarasikan Orde Baru sebagai bagian dari Partai Berkarya, sedangkan PSI menyatakan sebagai partai politik baru yang segar, dan tidak pernah melakukan kesalahan yang telah diperbuat oleh politisi lama khususnya Orde Baru. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSI dalam sebuah acara pertemuan para kader PSI dengan pidato Grace Natalie sebagai agenda utama di Medan pada tanggal 11 Maret 2019, yaitu¹⁴:

“Partai Solidaritas Indonesia adalah generasi politik baru yang segar—yang tidak ada kaitannya dengan Orde Lama maupun Orde Baru, kami tidak ingin mengulangi kesalahan mereka. Partai Solidaritas Indonesia adalah sebuah gagasan baru dalam politik Indonesia, yang mendasarkan diri pada semangat membangun politik yang bersih, politik yang bekerja melayani rakyat, politik yang terbuka. Hanya PSI, satu-satunya partai yang sejak awal tidak mencalonkan koruptor”.

Pengamat politik dari Indobarometer M. Qodari dalam wawancara dengan tirto.id pada tanggal 5 Juni 2018 menjelaskan bahwa, PSI dan Partai Berkarya ingin

¹² Semua Hal Tentang Berkarya, Partai Baru Bagi yang Rindu Orde Baru, diakses pada 27 September 2019, 21.29 WIB melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/semua-hal-tentang-berkarya-partai-baru-bagi-yang-rindu-orde-baru-1>

¹³ Profil Partai Berkarya, diakses pada 12 Mei 2020, 21.22 WIB melalui <https://www.berkarya.id/berita/180>

¹⁴ Beda Kami PSI dengan Partai Lain, diakses pada 27 September 2019, 15.37 WIB melalui <https://psi.id/berita/2019/03/11/beda-kami-psi-dengan-partai-lain/>

menegaskan perbedaannya dengan partai politik lain, karena menurut Qodari partai politik lain sepertinya sudah tidak terlalu fokus dengan isu Orde Baru dan Soeharto, maka dari itu kedua partai ini ingin mengambil perbedaan tersebut. Qodari juga menambahkan, bahwa dalam kontestasi politik ini tergantung kepada usaha masing-masing pihak partai untuk dapat meyakinkan masyarakat berdasarkan cara bersosialisasi yang digunakan oleh partai¹⁵.

1.2 Rumusan Masalah

Berakhirnya Pemilu 2019 ditandai dengan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 21 Mei tahun 2019, melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri. Berikut selengkapnya daftar perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU, diurutkan berdasarkan dari suara tertinggi ke suara terendah¹⁶:

¹⁵ Saling Serang Partai Baru Soal Soeharto, PSI versus Partai Berkarya, diakses pada 01 Oktober 2019, 13.17 WIB melalui <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/saling-serang-partai-baru-soal-soeharto-psi-versus-partai-berkarya-clHa>

¹⁶ Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang ditetapkan KPU, diakses pada 04 September 2019, 00.17 WIB melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>

Tabel 1.2 Jumlah Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2019

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase (%)
1	PDI-P	27.053.961	19,33%
2	Gerindra	17.594.839	12,57%
3	Golkar	17.229.789	12,31%
4	PKB	13.570.097	9,69%
5	Nasdem	12.661.792	9,05%
6	PKS	11.493.663	8,21%
7	Demokrat	10.876.507	7,77%
8	PAN	9.572.623	6,84%
9	PPP	6.323.147	4,52%
10	Perindo	3.738.320	2,67%
11	Berkarya	2.929.495	2,09%
12	PSI	2.650.361	1,89%
13	Hanura	2.161.507	1,54%
14	PBB	1.099.848	0,79%
15	Garuda	702.536	0,50%
16	PKPI	312.775	0,22%

Sumber : diolah dari data KPU

Menurut data yang diperoleh dari KPU, PDIP berhasil meraih 27.053.961 suara atau 19,33% dari total suara. Di urutan kedua yaitu, Partai Gerindra bertengger dengan 17.594.839 atau 12,57% dari total suara. Disusul oleh Partai Golkar sebanyak 17.229.789 suara atau 12,31% dari total. Selain itu sebanyak tujuh partai

ditetapkan tidak lolos melenggang ke senayan, dua di antaranya adalah Partai Berkarya dan PSI. PSI menempati urutan ke-12 jika diurutkan berdasarkan perolehan suara partai dari yang tertinggi ke suara terendah, yaitu berjumlah 2.650.361 suara atau 1,89% dari total suara. Artinya di tingkat nasional perolehan suara PSI lebih rendah dibandingkan dengan Partai Berkarya yang menempati urutan ke-11. Partai Berkarya sendiri mendapatkan 2.929.495 suara atau setara 2,09% dari total suara, persentasenya yaitu 0,20% lebih tinggi daripada PSI.

Salah satu penyebab kegagalan PSI dan Partai Berkarya dalam mendapatkan kursi parlemen adalah minimnya suara yang diperoleh kedua partai baru ini di beberapa provinsi. Contohnya di Provinsi Sumatera Barat yang didominasi oleh Partai Gerindra¹⁷. Partai Gerindra menang dalam kompetisi partai politik di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Suara Nasional Dalam Negeri Pemilu 2019 yang telah disahkan pada tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019 tingkat pusat di Sumatera Barat, memperlihatkan partai penguasa di Indonesia, yaitu PDI-P sama sekali tidak berpengaruh di Sumatera Barat. Berikut perolehan suara untuk partai politik untuk pemilu legislatif DPR RI di Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019, diurutkan berdasarkan dari suara tertinggi ke suara terendah :

¹⁷ Rekap Suara di Sumbar: Prabowo 85,95% Jokowi 14,05%, diakses pada 21 Oktober 2019, 23.18 WIB melalui <https://news.detik.com/berita/d-4546319/rekap-suara-di-sumbar-prabowo-8595-jokowi-1405>

Tabel 1.3 Jumlah Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif DPR

RI 2019 Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Gerindra	570.835
2	PAN	412.483
3	Demokrat	371.058
4	PKS	356.294
5	Nasdem	206.432
6	Golkar	202.182
7	PPP	141.865
8	PDI-P	134.232
9	PKB	88.871
10	Berkarya	55.667
12	Hanura	47.790
13	Perindo	43.510
14	PSI	38.373
15	Garuda	17.510
16	PKPI	4.310

Sumber : diolah dari data KPU

Hasil penetapan perolehan suara pemilu legislatif 2019 di Sumatera Barat membuktikan bahwa, PSI dan Partai Berkarya tidak mampu menempatkan para calon anggota legislatifnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Sosialisasi yang dilaksanakan PSI dan Partai Berkarya memiliki hubungan dalam

hal ini, sehingga kedua partai ini tidak mampu berkompetisi dengan partai-partai besar yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya.

Proses sosialisasi sangat dibutuhkan oleh setiap partai politik yang baru berdiri, karena sosialisasi politik menjadi sarana partai politik maupun para kandidat untuk mengkomunikasikan visi misinya kepada calon pemilih atau masyarakat. Sosialisasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai, pengetahuan, dan orientasi politik kepada seluruh warga negara. Sosialisasi politik dilakukan secara intensif, dalam artian setiap saat dan berkesinambungan¹⁸.

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff, sosialisasi politik merupakan suatu proses yang memungkinkan individu dapat mengetahui sistem politik yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsi mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik¹⁹. Proses sosialisasi politik secara praktis yang dilakukan oleh partai politik dapat memperkenalkan masyarakat kepada calon anggota legislatif atau pejabat terpilih untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada masyarakat agar dapat memberikan masukan atau tuntutan dari aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi politik dibutuhkan agen atau pihak-pihak yang melaksanakan proses sosialisasi tersebut. Para agen sosialisasi politik tersebut adalah keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung. Agen-agen sosialisasi politik tersebut memiliki peranan yang sangat vital, karena melalui agen-agen inilah PSI dan Partai Berkarya

¹⁸ (Putri, Nugraha et al., 2014) – Putri, D.A, Nugraha, LK., Kenawas, YC., Sinulingga, A., 2014. *Dari Konstituen ke Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca*. Laporan. *Research Centre for Innovation Policy and Governance*, didanai oleh Yayasan TIFA. Jakarta: CIPG, hlm. 4-5

¹⁹ Rafael Raga Maran. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 135

melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Proses sosialisasi ini sangat penting bagi kedua partai tersebut, karena kedua partai merupakan partai politik baru pada Pemilu 2019.

Sosialisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini fokus kepada bagaimana kedua partai baru tersebut memperkenalkan partainya kepada masyarakat, yang nantinya dapat memberikan dukungan kepada PSI dan Partai Berkarya. Pelaksanaan sosialisasi kedua partai ini memiliki isu-isu politik tersendiri yang dapat mempengaruhi masyarakat. Isu-isu politik tersebut dilakukan melalui di antaranya pada pengenalan partai. Berdasarkan uraian di atas yang juga merupakan realita politik saat sekarang ini dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari partai politik dan umumnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik dengan cara memperkenalkan partai kepada masyarakat.

Dapat diketahui bahwa PSI dan Partai Berkarya merupakan partai politik yang baru berdiri saat sekarang ini, namun kedua partai ini tidak mampu menempatkan para calon anggota legislatifnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal dilihat dari perolehan suara pemilu legislatif 2019. Berdasarkan penjelasan dan temuan-temuan di atas, penelitian ini bermaksud untuk membandingkan lebih jauh lagi bagaimana sosialisasi politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Berkarya sebagai partai baru pada Pemilu Legislatif 2019 di Sumatera Barat.

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh PSI dan Partai Berkarya pada Pemilu Legislatif Sumatera Barat tahun 2019, selain itu peneliti juga mencari tahu sarana dan agen sosialisasi politik yang

mempunyai peranan lebih besar terhadap partisipasi politik. Peneliti juga berasumsi, bahwa masing-masing antara PSI dan Partai Berkarya memiliki mekanisme serta segmen sosialisasi yang autentik, dan memanfaatkan seluruh agen/sarana sosialisasi yang ada, guna menyebarluaskan informasi tentang PSI maupun Partai Berkarya. Untuk menganalisa data yang ditemukan, peneliti menggunakan teori Michael Rush dan Phillip Althoff. Rush dan Althoff memandang sosialisasi politik sebagai proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsi mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Pada pelaksanaan terdapat enam agen atau sarana sosialisasi, yaitu keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, kelompok pergaulan, media massa dan kontak politik langsung²⁰.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka fokus utama penelitian ini adalah **“Bagaimana bentuk dan proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Berkarya pada pemilu legislatif 2019 di Sumatera Barat ?”**

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh PSI dan Partai Berkarya sebagai partai baru pada pemilu legislatif tahun 2019.

²⁰ Michael Rush & Phillip Althoff. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 47

- b. Untuk menganalisa bentuk sosialisasi politik yang digunakan oleh PSI dan Partai Berkarya, beserta hubungannya dengan kegagalan PSI dan Partai Berkarya dalam mencapai target *electoral threshold* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mampu memberikan pengetahuan, dapat menjadi sumber yang akurat, dan menjadi suatu acuan bagi penelitian sejenisnya mengenai disiplin ilmu politik khususnya mengenai sosialisasi politik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi partai politik khususnya dalam menerapkan sosialisasi politik berdasarkan teori untuk dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja partai dan menjalankan fungsi partai sebagaimana mestinya, serta mampu mencapai tujuan dan cita-cita suatu partai politik.

